

PENGASINGAN DI NEGERI SENDIRI: *Kehidupan Sosial Belanda Depok 1945 –1949*

Tri Wahyuning Irsyam

Perkumpulan Praktisi Profesi Kesejarahan

Email: titiirsyam@yahoo.com

Abstract: This article discusses the life of one of the communities commonly known as Belanda Depok. The Belanda Depok community is a descendant of the first community that was deliberately formed by the Depok authority at the end of the seventeenth century, Cornelis Chastelein. The Belanda Depok community is placed within legal and social boundaries to separate it from other groups in Depok. The method used to explain the life of the Belanda Depok community is a historical method consisting of 5 stages, namely topic selection, source collection, criticism, interpretation or analysis, and finally historiography or research results. The results of this study found that the rulers of Depok had separated from other communities that had previously coexisted and were together in society. As a result, socially and psychologically the Belanda Depok communities is like being isolated in their own country. The social and psychological distance created by the ruler also "tortures" them in their daily lives.

Keywords *Daily life, Exile, and Belanda Depok Communities*

Pengantar

Kelompok komunitas yang disebut sebagai “Belanda Depok” menjadi suatu fenomena sosial yang menarik untuk dicermati dalam konteks historis. Keberadaannya sebagai suatu satuan komunitas yang menghuni tanah Depok sejak akhir abad XVII ini memunculkan kelompok yang berbeda dibandingkan dengan komunitas lain yang menghuni daerah sekitarnya. Perbedaan ini terletak pada agama, hubungan sosial, penampilan fisik dan perkembangan kehidupan mereka terhadap masyarakat lainnya, yang tinggal dan berinteraksi dengan mereka.

Faktor historis sangat menentukan perbedaan ini. Sebagai keturunan dari komunitas pertama yang sengaja dibentuk oleh penguasa Depok pada akhir abad XVII, Cornelis Chastelein, komunitas ini telah ditempatkan dalam batas-batas legal dan sosial yang jelas untuk memisahkannya dari kelompok lain (Haar & Moll, 1869, p. 552). Agama Kristen yang diwariskan sebagai pandangan hidup satu-satunya kelompok ini menjadikan mereka sebagai suatu komunitas pribumi Kristen pertama yang tinggal di daerah pedalaman *Batavia en Ommelanden* (Raben, 2000, p. 93). Identitas Kristen ini memberikan mereka hak-hak khusus dalam sistem kehidupan sosial kolonial Belanda

dibandingkan oleh umat beragama lain, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan sebagainya.

Faktor kedua yang membedakan mereka adalah kepemilikan tanah. Dengan ditetapkannya Depok sebagai tanah partikelir sejak awal abad XVIII, hak-hak sosial agraris segera bisa dinikmati oleh para pewaris tanah ini yang terdiri atas para bekas keturunan budak sebagai *primus inter pares* Depok. Mereka mendapatkan hak milik mutlak (*eigendom verponding*) (Faes, 1897, p. 288) seperti halnya tanah partikelir lain yang ada dalam struktur agraria kolonial dengan segala hak yang melekat pada pemilik tanahnya. Dengan status ini, mereka berhak menentukan tata ruang di lahan yang mereka huni dan miliki. Dari tata ruang ini, kemudian muncul sejumlah bangunan yang saling terkait untuk mencerminkan kehidupan sosial mereka : gereja, sekolah, makam, perumahan, fasilitas publik.

Meskipun dikelilingi dengan tanah partikelir lainnya, seperti Pondok Cina di utara, Cinere di sebelah barat, Citayam di sebelah selatan dan Cimanggis di sebelah timur, tanah partikelir Depok memiliki kekhususan (Nes, 1848, p. 26). Ketika pemerintah Belanda menerbitkan peraturan yang menghapuskan tanah partikelir pada tahun 1912, tanah partikelir Depok berhasil lolos dari aplikasi peraturan ini. Sampai akhir pemerintahan kolonial, tanah partikelir Depok tetap mampu mempertahankan eksistensinya sampai akhirnya secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950.

Pembukaan seminari oleh yayasan zending Kristen yang terlembaga dalam Gereja Hindia (*Indische Kerk*) di Depok pada tanggal 21 Agustus 1878 memperkuat karakter daerah ini dan komunitasnya sebagai suatu satuan sosial bercorak Kristen di tengah komunitas pribumi Muslim yang luas. Sebagai tempat pendidikan para calon penginjil serta tempat penyemaian ajaran Kristen, Depok menduduki posisi penting dalam perkembangan sejarah agama ini di Hindia Belanda. Namun demikian, institusi ini tidak memberikan pelayanan bagi penyiaran agama Kristen di sekitar Depok. Para alumninya disiapkan untuk penyiaran agama Kristen dan pelayanan rohani bagi jemaat Kristen di luar Depok, bahkan di luar Jawa (Anonim, 1879, p. 5).

Faktor kedua yang mempengaruhi kehidupan sosial Depok adalah pembangunan jalur kereta api oleh *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* pada tahun 1873. Jalur kereta api yang dibuka oleh perusahaan ini menghubungkan dua pusat kekuasaan kolonial di Hindia, yaitu Batavia dan Buitenzorg. Depok mendapatkan sebuah stasiun transit pada jalur kereta api pertama ini, dan kehadiran stasiun mendorong mobilitas sosial yang tinggi sekaligus menjadi sentra transportasi dan komunikasi bagi daerah sekitarnya. Di samping itu jalur kereta api yang membagi dua menjadi Depok timur dan Depok barat juga menjadi pemisah antara para penghuni Depok sebagai pemilik tanah (Belanda Depok) di sebelah timur rel kereta, dan para penghuni pendatang atau orang numpang di sebelah barat rel (Suryana, 2004, p. 35). Nilai strategis Depok dalam hal transportasi ini kemudian berkembang pada awal abad XX ketika investasi trem mulai menghubungkan kota ini dengan kota-kota kecil dan daerah pelosok di sekitarnya seperti Cibinong, Parung, Cimanggis, dan Citeureup (*Koloniaal Verslag over het jaar 1901, 501*).

Tanah partikelir, agama Kristen, dan aksesibilitas menjadi tiga unsur sosial utama dari masyarakat Depok selama berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ketiganya membentuk karakter masyarakat Depok yang lebih mengidentifikasi diri pada kelompok Eropa dalam stratifikasi sosial masyarakat kolonial dibandingkan sebagai kelompok pribumi yang merupakan asal-usul mereka. Proses Eropanisasi ini tidak pernah dipertimbangkan oleh pendiri Depok sendiri yakni Cornelis Chastelein, yang hanya memiliki idealisme pertumbuhan suatu komunitas Kristen dengan ajaran dan norma-norma agama yang dianggap terbaik. Proses ini berlangsung seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial dan respon dari komunitas Depok demi eksistensi dan keuntungan mereka. Melalui identifikasi dengan peradaban Eropa, dalam struktur sosial kolonial, masyarakat penghuni tanah Depok ini memperoleh sebutan sebagai “Belanda Depok” (Knorr, 2014, p. 122).

Metode

Penelitian tentang komunitas Belanda Depok yang dibentuk oleh penguasa local ini menggunakan metode Sejarah. Metode Sejarah secara umum meliputi 5 tahapan, yakni menentukan dan memastikan topik, mengumpulkan sumber sebagai data yang digunakan dalam penulisan, kritik dan validasi data, interpretasi dan analisis data untuk menentukan sintesis, dan historiografi yang mewujud dalam artikel ini. Sumber data yang dikumpulkan diperoleh dari sejumlah dokumen koran, laporan, koloniaal verslag, dan buku-buku pendukung lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan untuk memastikan temuan penelitian yang berbasis pada metode Sejarah yang digunakan.

Pembahasan

Proklamasi Kemerdekaan dan Belanda Depok

Pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Sukarno-Hatta. Hanya dalam waktu beberapa jam, berita itu segera menyebar ke seluruh penjuru kota Jakarta dan sekitarnya. Penyebaran dilakukan lewat berita radio Jepang yang segera diambil alih oleh para pemuda dan pegawai Indonesia yang bekerja di sana berinisiatif untuk menyebarkan berita proklamasi tersebut. Di samping itu sejumlah pemuda kelaskaran yang tergabung dalam organisasi nasionalis revolusioner menyebar ke pelosok dan ke kota-kota lain untuk menyebarkan berita tersebut.

Peristiwa ini hanya merupakan klimaks dari perkembangan revolusioner yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kelompok pemuda sebagai unsur utama penunjang revolusi yang telah berkoordinasi dan mengadakan persiapan di lapangan bersama dengan perkembangan politik di tingkat elite yang didominasi oleh generasi tua telah menyiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan politik yang terjadi. Dengan menolak opini generasi tua yang lebih bersikap menunggu keadaan, generasi muda memaksa proklamasi kemerdekaan segera diumumkan (Kahin, 2004, p. 134).

Pemaksaan ini hanya menjadi perwujudan dari gejolak revolusioner yang telah berkembang pada hari-hari menjelang 17 Agustus 1945. Gejolak ini telah menjiwai para

tokoh pemuda dan melalui interaksi mereka yang lebih cepat dan lebih luas di kalangan bawah masyarakat dibandingkan elite politik nasionalis, segera juga mempengaruhi pandangan publik dan mendominasi situasi kehidupan sosial. Dengan cepat suasana revolusioner segera mewarnai perilaku masyarakat yang dimunculkan dengan istilah “Bersiap” (Cribb, 1991, p. 63).

Semangat bersiap ini dimaksudkan untuk mempercepat pengambil-alihan kekuasaan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan terhadap berbagai ancaman, baik dari tentara pendudukan Jepang yang masih mempertahankan struktur kekuasaannya maupun terhadap kemungkinan kembalinya Belanda yang akan mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Dua kelompok ini menjadi target utama permusuhan yang dikobarkan oleh gerakan revolusioner nasionalis para pemuda.

Sebagai akibatnya tindak kekerasan di mana-mana terjadi. Terhadap tentara Jepang yang masih memiliki kekuasaan atas infrastruktur publik termasuk juga instalasi sipil dan militer di Jakarta dan kota-kota lain, gerakan massif dengan memobilisasi sejumlah besar pemuda diarahkan untuk mengambil alih infrastruktur dan persenjataan yang dibutuhkan bagi pembekalan diri. Kekuatan gabungan antara organisasi keamanan yang dibentuk resmi oleh pemerintah (Badan Keamanan Rakyat) dan organisasi kelaskaran pemuda menjadi senjata yang ampuh dalam melumpuhkan kekuatan militer Jepang dengan akibat penyerahan kekuasaan dan persenjataan mereka (Anderson, 2006, p. 126).

Pengalihan persenjataan Jepang ini memperkuat keyakinan dan semangat terutama di kalangan kelaskaran pemuda tentang peran mereka dalam mempertahankan revolusi. Sejak akhir Agustus 1945 dengan keberhasilan mereka menguasai sejumlah infrastruktur dan persenjataan dari tentara Jepang, gerakan mereka mulai bergeser dari arah yang ditempuh oleh tentara resmi (BKR). Mereka mengambil inisiatif sendiri meskipun masih berada dalam koridor arah revolusi, yaitu menghadapi lawan yang dianggap membahayakan bagi revolusi nasional (Reid, 1974, p. 3).

Sasaran mereka berikutnya setelah tentara Jepang adalah orang-orang Eropa dan khususnya Belanda, yang pada bulan September 1945 mulai berusaha melepaskan diri dari kamp-kamp tawanan Jepang di Jakarta dan sekitarnya. Meskipun ada instruksi dari panglima Sekutu untuk Asia Tenggara (Southeast Asia Command) agar tentara Jepang mempertahankan keamanan dan ketertiban (McMillan, 2005, p. 11) dan pimpinan Jepang juga menginstruksikan agar orang-orang Belanda di dalam kamp tidak meninggalkan kamp, beberapa dari mereka telah keluar dan berusaha untuk kembali ke bekas rumah tinggal mereka sebelum perang. Di samping kesulitan untuk menemukan bangunan yang telah mengalami banyak perubahan akibat gejolak perang dan pendudukan, keberadaan mereka di luar kamp juga menjadi obyek serangan sebagai akibat meningkatnya eskalasi kebencian terhadap unsur Eropa di kalangan massa rakyat. Kehadiran orang Eropa dan khususnya Belanda di mata massa revolusioner dianggap sebagai simbol upaya kekuatan kolonial lama untuk mengembalikan dominasi politik mereka sebelum perang.

Kemunculan mereka dalam kehidupan publik kota Jakarta dan sekitarnya menjadikan mereka obyek penyerangan dan tindak kekerasan lain yang dipicu oleh kebencian massa terhadap semua yang berafiliasi dengan Belanda. Hal itu menyebar lebih luas pada unsur-unsur peradaban lain yang dianggap berorientasi atau berpotensi

membantu kekuatan kolonial untuk memulihkan status quo. Masyarakat Timur Asing, khususnya Tionghoa, yang di masa kolonial mendapatkan perlakuan lebih baik daripada masyarakat pribumi, dan menghadirkan kekuatan ekonomi yang besar, juga menjadi target dari penyerangan massa revolusioner. Kelompok ini dianggap berpotensi mendukung Belanda dan setidaknya memiliki kekayaan yang bisa digunakan untuk mendukung gerakan revolusioner, dan harus diambil secara paksa.

Gerakan kebencian tersebut menyebar luas bahkan di kalangan kelompok tertentu dalam masyarakat pribumi yang dianggap memiliki identifikasi dengan kekuatan kolonial. Umat Kristen yang dianggap juga memperoleh fasilitas istimewa dalam kehidupan sosial di bawah sistem kolonial segera menjadi sasaran penyerangan, khususnya yang berada di pinggiran kota dan pelosok. Sejumlah rumah ibadah Katolik atau Kristen menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran massa pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi, sementara para rohaniawan Eropa yang mulai bebas berkarya kembali juga tidak luput dari penyerangan, penculikan dan pembunuhan (Steenbrink, 2015, p. 12).

Tindak kekerasan yang berubah menjadi kebrutalan dan kekejaman di tempat-tempat publik melukiskan suasana hati dan semangat perjuangan menggelora dengan diwarnai oleh perasaan anti-asing yang tinggi. Korban yang jatuh beragam mulai dari pria dewasa hingga perempuan termasuk juga mereka yang sedang mengalami kehamilan, seperti perempuan Belanda yang ditangkap oleh sekelompok pemuda pada bulan Oktober 1945 di daerah Pasar Minggu dan dibawa ke stasiun Pasar Minggu. Di sana perempuan ini mengalami tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan kemudian dibunuh secara brutal (ANRI).

Peristiwa seperti di atas segera meluas juga ke pinggiran kota Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi dan Depok. Obyek sasaran seperti yang dianggap sebagai kelompok asing dan berpotensi membahayakan revolusi segera diserang. Di Tangerang kelompok minoritas Tionghoa menjadi sasaran utama dalam penyerangan, pengrusakan materi dan pembunuhan. Sementara itu di daerah Bekasi, obyek penyerangan yang dominan diarahkan pada kelompok minoritas Kristen yang terdiri atas campuran Eropa, Timur Asing dan juga umat pribumi terutama pendatang seperti dari Manado, Flores dan Ambona (*“Beroep Op de Wereld” Dalam Het Dagblad, Tanggal 11 Desember 1945, Lembar Ke-1*).

Depok menjadi prototype fenomena itu, yaitu kehadiran pribumi Kristen yang disebut sebagai Belanda Depok sebelum perang. Kelompok yang dianggap eksklusif selama ini dan mendapatkan perlakuan istimewa, atau setidaknya memiliki identifikasi dengan Belanda dan peradaban Barat sehingga berbeda dengan lingkungan sekitarnya secara menyolok, dengan mudah menjadi target penyerangan massa revolusioner. Kecemburuan sosial dari masyarakat yang menghuni lahan di sekitarnya atau mereka yang menumpang tinggal di tanah partikelir Depok selama ini memanfaatkan situasi ini terutama bagi kepentingan ekonomi. Dengan mengikuti gerakan massa revolusioner yang juga didukung oleh Tentara Indonesia (TKR), mereka berperan dalam melakukan penyerangan dengan penjarahan dan pembakaran sebagai kelanjutannya atas aset dan harta orang-orang Belanda Depok (*“Bloedbad Te Depok” Dalam Provinciale Drentsche En Asser Courant, Tanggal 27 Oktober 1945, Lembar Ke-2*).

Meskipun memiliki identifikasi dan afiliasi yang jelas dengan Belanda, keberadaan komunitas Belanda Depok ini tidak mengalami banyak gangguan dan perubahan di zaman pendudukan Jepang. Mereka masih tetap mempertahankan kepemilikan asetnya dan kehidupan mereka tetap dijamin di bawah tentara Jepang. Hanya beberapa orang Belanda yang tinggal di antara mereka sebagai pendeta dan guru ditangkap dan dimasukkan dalam kamp internir. Masyarakat Belanda Depok sendiri diklasifikasikan sebagai orang pribumi oleh militer Jepang dan dengan demikian mendapatkan perlakuan serta pengakuan seperti orang pribumi lainnya.

Penarikan diri tentara Jepang dan belum datangnya pasukan Sekutu atau Belanda menghilangkan perlindungan yang selama ini dinikmati oleh kelompok Belanda Depok. Secara tiba-tiba mereka dihadapkan pada perubahan politik yang profan dan radikal serta diikuti dengan pergolakan massa yang tak terbendung di mana-mana. Meskipun orang Belanda bekas penghuni Depok sendiri pada hari-hari pertama setelah proklamasi belum tampak kehadirannya dalam kehidupan publik, bukan berarti komunitas Belanda Depok ini selamat dari sasaran permusuhan terhadap orang asing oleh massa revolusioner. Hal ini segera menandai perubahan nasib mereka pada tahun-tahun pergolakan revolusioner 1945-1949.

Belanda Depok dalam Pengasingan

Bulan September 1945 merupakan bulan pergantian dan pengambilalihan kekuasaan. Rezim militer Jepang, meskipun mendapatkan instruksi dari panglima Sekutu untuk mempertahankan status quo, tidak berfungsi dengan efektif. Kelesuan semangat mereka sebagai pihak yang kalah perang dan kekuatan revolusioner pemuda yang tak terbendung mengakibatkan banyak perwira Jepang memilih jalan menghindari konflik dan korban. Mereka lebih banyak mengalah terhadap tuntutan massa untuk menyerahkan tanggungjawab dan perlengkapannya. Sementara itu pihak Sekutu sendiri yang belum siap untuk menduduki Indonesia sampai akhir September 1945 tidak terlalu banyak mengetahui kejadian yang berlangsung di bekas koloni Hindia Belanda itu, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Praktis selama bulan tersebut, kekuatan nasionalis revolusioner yang dimotori dan dipimpin oleh kelompok pemuda mendominasi kehidupan dunia politik dan sosial. Mereka menguasai pusat-pusat perkotaan dan mengendalikan semua aspek kehidupan dengan semangat revolusionernya. Mereka memimpin pergerakan massa untuk menguasai infrastruktur dan menghancurkan semua simbol dan unsur kekuatan asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan revolusi dan eksistensi negara baru yang diproklamirkan sebulan sebelumnya. Kelompok masyarakat asing atau elite tradisional lama yang masih berusaha bertahan, khususnya yang berafiliasi dengan struktur kolonial di masa lalu, menjadi target serangan utama.

Apa yang menarik dalam hal ini adalah kendali suasana oleh kekuatan pemuda bersenjata revolusioner ini. Mereka mampu memobilisasi massa dan bahkan bergerak di dalam maupun di luar institusi keamanan resmi yang dibentuk oleh pemerintah baru revolusioner Indonesia (BKR dan TKR). Dengan keberadaannya di luar institusi struktural bersenjata ini, kekuatan pemuda pendukung revolusi merasa lebih bebas dalam bertindak dan bergerak serta melakukan pendekatan kepada massa rakyat umumnya. Dari

situ mereka mampu memobilisasi massa dalam bentuk gerakan massif yang diarahkan sesuai dengan target penyerangan mereka (*"Bereid Tot Onderhandelen" Dalam Het Parool, Tanggal 18 Oktober 1945, Lembar Ke-2*).

Di Depok, pola gerakan radikal bersenjata demikian terjadi serentak hampir bersamaan dengan daerah sekitarnya. Setelah Jakarta didominasi oleh kekuatan pendukung revolusi utama dan peralihan kekuasaan berangsur-angsur terjadi, pergerakan meluas ke pinggiran kota. Dengan atau tanpa kekerasan, gerakan ini berusaha untuk menguasai situasi politik di seluruh kota itu. Pengaruh mereka yang kuat tampak dari pola pengerahan massanya yang berlangsung massif dari segala penjuru untuk mengepung kota tersebut.

Gerakan massa bersenjata dari semua arah menyerbu serentak kota Depok pada tanggal 6 Oktober 1945. Umumnya massa ini berdatangan dari perkampungan di sekitar kota pemukiman Depok, tetapi ada juga sejumlah besar massa yang berasal dari daerah lain dan telah berkumpul di perkampungan pinggiran kota sambil menunggu waktu yang ditetapkan oleh para pemimpin massa ini untuk bergerak. Massa dari luar kota bersenjata campuran antara senjata api ringan yang mereka rebut dari tentara Jepang tetapi sebagian besar bersenjata tajam yang dibawa dari rumah mereka masing-masing. Setelah melakukan pengepungan beberapa saat sebelumnya, massa serentak memasuki perkampungan Depok dan melakukan penyerangan (*"Moordpartij Te Depok" dalam Provinciale Drentsche en Asser Courant, Tanggal 17 Oktober 1945, lembar Ke-2*).

Sasaran penyerbuan ini pada hari pertama adalah bangunan-bangunan yang menjadi pusat kegiatan agama Kristen, seperti gereja, sekolah, panti asuhan dan bahkan kuburan. Gereja menjadi obyek penyerangan pertama dan mengalami kerusakan paling parah dibandingkan yang lain. Mungkin saja ada pemikiran dari para penyerang bahwa gereja menjadi tempat pengumpulan massa kontra-revolusi dan pusat gerakan yang akan menyambut kembali kedatangan Belanda. Akan tetapi yang paling jelas adalah bahwa gereja Kristen dianggap sebagai simbol budaya Barat dan bukan agama kelompok mayoritas pribumi pendukung revolusi. Secara ideologis, gereja menjadi simbol dari semangat dan identifikasi umatnya dengan kekuatan pro-status quo kolonial. Oleh karenanya gereja menjadi sasaran pertama dari penyerbuan dan pendudukan massa yang mengakibatkan kerusakan luar biasa atas bangunan ini.

Sekolah yang berada tidak jauh dari gereja juga tidak luput dari serangan dan penjarahan massa ini. Mereka mendobrak ruang kelas dan memporak-porandakan perabotan untuk belajar. Praktis semua kaca di jendela baik di gereja maupun sekolah pecah dan begitu juga daun pintu. Lingkungan sekitar sekolah dan gereja juga mengalami dampak pengrusakan ini. Panti asuhan yang berada di dekat sekolah segera menerima giliran penyerangan dan penjarahan meskipun pada mulanya masih terbatas tanpa mengganggu para penghuninya.

Kompleks makam juga menjadi obyek penyerangan. Akan tetapi berbeda dengan semua bangunan lain, pengrusakan pada kompleks makam Kristen ini memiliki motivasi yang khusus. Sebelum pengrusakan, ada desas-desus bahwa di balik batu nisan tersimpan harta kekayaan jenazah yang dimakamkan di sana. Oleh karenanya pengrusakan yang dilakukan oleh massa penjarah ini lebih banyak dimaksudkan sebagai penggalian kubur kembali. Mereka merusak nisan dan mendongkel batu penutup liang sehingga berhasil

menemukan peti jenazah. Mereka memaksa membuka peti dan pada akhirnya setelah tidak dapat menemukan harta seperti yang digosipkan, mereka meninggalkannya begitu saja. Akibatnya kondisi makam tidak hanya rusak tetapi juga berubah menjadi pemandangan mengerikan dengan banyak lobang makam dan peti-peti jenazah lama yang dibiarkan terbuka.

Pada hari kedua, 7 Oktober 1945, sasaran penyerangan meluas ke pemukiman. Peristiwa hari pertama telah menimbulkan ketakutan luar biasa pada penduduk Depok khususnya mereka yang dicap sebagai Belanda Depok. Praktis tidak ada perlawanan apapun, dan bahkan hampir semuanya bersembunyi dalam rumah mereka. Listrik yang padam pada malam hari menambah suasana kota itu mencekam dan sunyi seperti kota mati. Sementara kelompok massa bersenjata masih menguasai pusat-pusat strategis, termasuk kantor kawedanan yang telah dihuni oleh wedana Republik Indonesia meskipun diangkat di masa pendudukan Jepang.

Pasukan TKR yang kemudian tiba di tempat itu pada sore harinya, segera menduduki kantor yang di masa pemerintahan Jepang berfungsi sebagai kantor polisi. Mereka bertugas mengawal kepentingan resmi pemerintah Indonesia di Depok yang fungsinya dijalankan oleh wedana, setelah pejabat ini menyatakan dirinya sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada bupati Bogor yang diangkat dan mengakui pemerintahan Sukarno-Hatta. Dengan demikian fungsi TKR di Depok lebih bersifat sebagai pengawal kepentingan pemerintah Indonesia daripada menjaga keamanan dan mengendalikan kestabilan suasana (*"Vijf Eischen Der Indonesie"* Dalam *Leeuwarder Koerier*, Tanggal 20 Oktober 1945, Lembar Ke-2).

Bertolak dari situ, praktis kendali keamanan Depok pada hari-hari tersebut berada di tangan para pemimpin laskar bersenjata dan organisasi pemuda yang memimpin massa rakyat bersenjata. Meskipun mereka juga menghormati aparat pemerintah Indonesia, mereka cenderung bertindak sendiri. Dengan alasan mengamankan revolusi dari musuh-musuh pro-kolonial, mereka berusaha mendapatkan legitimasi dari aparat Indonesia untuk melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan. Hal ini mengakibatkan aksi revolusioner mereka berubah menjadi teror, terutama ketika kini sasaran gerakan mereka mulai ditujukan kepada penduduk Belanda Depok yang menghuni pemukiman tersebut.

Sejak pagi pengumpulan massa bersenjata di beberapa titik kota Depok mulai bergerak menuju daerah pemukiman. Mereka melakukan penggedoran setiap rumah dan memaksa para penghuni rumah untuk keluar. Kemudian mereka menggiring para penghuni rumah ke lapangan dekat sekolah dan mengumpulkannya di sana. Setelah itu mereka kemudian mencari para tokoh masyarakat Kristen Depok ini termasuk pendeta dan mengatakan bahwa semua orang itu akan mereka tahan di stasiun. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 600 orang pria, sementara dua ribuan perempuan dan anak-anak dibawa ke dua bangunan besar dan ditahan di sana (*"Gruweldaden van Rampokkers"* Dalam *Algemeen Handelsblad*, Tanggal 18 Oktober 1945, Lembar Ke-2).

Di antara mereka terdapat juga beberapa orang Belanda yang telah berhasil keluar dari kamp interniran Jepang di Jakarta dan kembali ke rumahnya di Depok. Perlakuan terhadap orang-orang Belanda ini berbeda dengan orang Kristen pribumi. Tindak kekerasan lebih banyak ditunjukkan oleh para tokoh pemuda terhadap orang-orang Belanda ini. Sebagai akibatnya sejumlah orang Belanda yang tidak tahan mencoba

melarikan diri. Akan tetapi pelarian ini segera dikejar oleh sekelompok orang dan setelah ditangkap kembali, pelarian ini mengalami penyiksaan yang berakhir dengan kematian. Menurut laporan intelijen Belanda, sekitar 20-an orang terbunuh dalam aksi ini (*“Troepen Naar Depok” Dalam de Tijd, Tanggal 18 Oktober 1945, Lembar Ke-2.*, n.d.). Seorang pemuda Belanda bernama Gerardus Johannes Schier dibunuh setelah mengalami tindak kekerasan di pelataran stasiun, sementara beberapa pemuda lain yang melarikan diri ke arah hutan Depok berhasil bersembunyi dari para pengejanya selama dua hari. Di samping mereka yang tewas ditembak oleh laskar bersenjata, salah seorang pemuda melalui jalan pelosok berhasil lolos dan mencapai pinggiran selatan kota Jakarta untuk melapor kepada pasukan pendudukan Sekutu yang telah tiba di sana (*“Moordpartij Te Depok” Dalam Provinciale Drentsche en Asser Courant, tanggal 17 Oktober 1945, lembar Ke-2*).

Sementara itu kondisi massa penduduk Depok yang ditahan dalam kompleks stasiun juga menyedihkan. Selain diliputi perasaan takut dan tidak pasti tentang nasib mereka, juga tidak ada persediaan logistik yang sejak awal disiapkan untuk memberi mereka makan selama hari itu dan hari-hari berikutnya. Sebagai akibatnya sepanjang hari tanggal 7 Oktober 1945, orang-orang yang ditawan oleh kelompok bersenjata ini tidak mendapatkan makan dan minum (*“Moordpartij in Depok” dalam de Volkskrant, tanggal 16 Oktober 1945, lembar Ke-2*). Sementara itu rumah-rumah mereka segera dijarah barang-barangnya oleh massa dan di beberapa rumah terjadi aksi pengrusakan terhadap perabotan.

Sepanjang hari tanggal 7 Oktober 1945 suasana kota Depok sunyi seperti kota mati. Perabotan yang rusak banyak ditemukan berserakan di jalan raya. Hanya beberapa kelompok massa bersenjata tajam yang tampak berkeliaran di jalan-jalan, sementara segala aktivitas ekonomi praktis tidak ada. Mereka juga diikuti oleh sejumlah penduduk Depok yang tidak termasuk dalam kelompok umat Kristen atau Belanda Depok. Umumnya mereka adalah orang pribumi pendatang yang telah tinggal di kota itu sejak zaman tanah partikelir Depok masih berlangsung. Sebagai pendatang, status mereka adalah orang numpang yang wajib patuh dan tunduk kepada semua perintah dan pungutan tuan tanah, dalam hal ini beberapa keluarga keturunan para budak yang dibebaskan pada era Cornelis Chastelein di atas. Oleh karenanya hubungan semi-perbudakan muncul antara pemilik tanah dan orang numpang ini, meskipun kemudian hubungan itu berubah menjadi hubungan semi-persewaan.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh mereka tidak hanya untuk melepaskan diri dari ikatan subordinasi di atas, melainkan juga untuk mengambil alih kekayaan penguasa dan pemilik tanah. Mereka sebagai penghuni yang lebih lama di Depok mengetahui di mana kekayaan para pemilik tanah itu disimpan. Mereka juga mengetahui jalan-jalan dan kompleks pemukiman di kota Depok dibandingkan para pemuda dan massa pendatang dari luar kota. Dari situ mereka tidak hanya menjadi penunjuk jalan melainkan juga menjadi kelompok perintis dalam mengarahkan gerakan massa terhadap sasarannya. Tidak jarang dendam pribadi juga ikut berperan dalam proses gerakan ini.

Akhirnya pada hari ketiga pendudukan kota itu, yakni 8 Oktober 1945, aksi penguasaan kota diperluas sampai ke pinggiran. Hingga hutan Depok yang dianggap sebagai batas paling barat yang menembus daerah Cinere, semua gerakan pembersihan

dilakukan untuk mencari sisa-sisa penduduk Belanda Depok yang bersembunyi. Begitu juga ke arah timur hingga mencakup kampung Cimanggis yang umumnya lebih banyak dihuni oleh penduduk pribumi. Infrastruktur di luar semua yang telah dikuasai kecuali yang telah diduduki oleh aparat pemerintah sipil dan militer RI menjadi sasaran mereka, seperti lumbung desa yang menyimpan produksi tanah partikelir. Gudang beras yang ada dijarah isinya dan dibagikan kepada massa rakyat, sementara rumah-rumah orang Belanda Depok yang telah ditinggalkan penghuninya dirampok dan dirusak (ANRI).

Pada hari ketiga pendudukan ini, koordinasi antara aparat pemerintah RI dan para pemuda pemimpin massa rakyat mulai diadakan tentang rencana mereka selanjutnya tentang kota Depok dan para tawanan yang mereka kumpulkan. Menurut pemikirannya, orang-orang itu akan diangkut ke Bogor untuk dipindahkan ke sana. Mereka tidak akan dikembalikan ke Depok dan ada dugaan tanah Depok akan dibagikan kepada para penduduk yang numpang untuk digarap. Sementara itu secara administratif, Depok diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan Indonesia secara resmi dan dalam hal ini akan diletakkan di bawah pemerintahan bupati di Bogor dan diwakili oleh seorang wedana.

Penyelamatan dan Penempatan Kembali.

Rencana yang dirancang sebelumnya tidak berjalan sesuai dan tidak terlaksana. Pada hari berikutnya pasukan Sekutu yang dikirim untuk menduduki Bogor dari Jakarta memasuki Depok. Mereka terdiri atas para serdadu Gurkha dari kesatuan resimen senapan Queen Anna, yang juga disertai oleh sejumlah wartawan perang. Dengan beberapa kesatuan bersenjata reguler yang disertai kendaraan berat, komandan pasukan ini memutuskan untuk singgah ke Depok. Ia menerima instruksi dari pimpinannya di Jakarta agar menduduki Depok dan menyelamatkan kota ini dari eksekusi revolusioner, khususnya menjamin keselamatan dari penduduk Kristen Depok. Semua ini jelas berkat laporan dari pelarian orang Belanda yang berhasil lolos dari kejaran laskar bersenjata dua hari sebelumnya.

Kedatangan tim perintis dari kesatuan pasukan Sekutu ke Depok ini segera menuju ke tempat yang dianggap paling menentukan kendali pemerintahan Depok, yaitu kantor kawedanan Depok yang sekaligus menjadi markas kesatuan TNI lokal. Komandan kompi pasukan Inggris yang tiba di sana disambut oleh wedana Depok dan komandan TNI setempat. Dalam pembicaraan tersebut, disampaikan bahwa pada hari itu kota Depok akan diduduki oleh pasukan Sekutu yang bermaksud untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Dalam klasifikasi tawanan perang ini, komandan pasukan Inggris memasukkan orang-orang Belanda Depok yang ditahan di sana dan menyatakan bahwa mereka akan dibawa ke Bogor untuk diletakkan di bawah pengawasan komandan pasukan Sekutu. Wedana dan komandan TNI menyetujui permintaan itu dan segera menyerahkan kewenangan dan tanggungjawab keamanan kota kepada komandan Sekutu. Selanjutnya Wedana RI di Depok meninggalkan kota itu menuju ke Cibinong dengan tujuan untuk menghadap kepada bupati Indonesia yang berkedudukan di sana. Sementara itu komandan TNI segera menggabungkan diri dengan kesatuan TNI yang berada di daerah Bogor dan sekitarnya.

Setelah tercapainya kesepakatan tersebut, sebaliknya laskar bersenjata yang selama ini bertugas menjaga orang-orang Belanda Depok di stasiun belum bersedia melepaskan para tahanan tersebut. Mereka yang berkekuatan sekitar 800an orang siap melakukan perlawanan sehingga pertempuran tidak bisa dihindarkan. Namun setelah berlangsung pertempuran singkat dan jatuh sejumlah korban, mereka menarik diri ke arah Bogor (*"De Toestand in Indie"* Dalam *Opregte Steenwijker Courant, Tanggal 26 Oktober 1945, lembar Ke-2., n.d.*) dan tugas mereka digantikan oleh kesatuan kompi pasukan Inggris perintis yang berkedudukan di bekas kantor wedana. Langkah pertama dari komandan kompi itu adalah mengupayakan logistik untuk memberikan makanan dan pengobatan kepada para tahanan itu, sambil menunggu kedatangan pasukan induk Sekutu yang ditugasi untuk menduduki dan mengamankan kota Depok dan sekitarnya.

Pasukan yang dimaksudkan tiba pada tanggal 14 Oktober 1945 dan segera melakukan koordinasi lokal kewilayahan di sana. Melalui kesepakatan antara para perwira Sekutu dan desakan dari beberapa tokoh Belanda Depok, akhirnya keputusan diambil untuk membawa mereka ke Bogor dengan kereta api untuk pria dan kaum wanita serta anak-anak dengan transportasi militer (*"De Toestand te Depok"* dalam *Leeuwarder Koerier, tanggal 19 Oktober 1945, Lembar Ke-2, n.d.*). Pada hari itu keberangkatan berlangsung menuju Bogor dan tibanya di sana, mereka ditempatkan di sebuah bekas kamp interniran Jepang yang telah diperbaiki agar layak dijadikan sebagai barak penampungan sementara dengan pengawalan sekitar 400 orang tentara dan petugas medis yang datang dari Batavia (*"Onrust in Indie Duurt Voort"* dalam *Bredasche Courant, Tanggal 19 Oktober 1945, Lembar Ke-2., n.d.*). Sementara itu untuk kaum pria yang diangkut dengan kereta api, mereka segera diturunkan di stasiun Bogor dan dari sana di bawah pengawalan gabungan tentara Inggris dan polisi istimewa Indonesia dibawa ke bekas penjara Pledang untuk ditempatkan sebagai baraknya (*Indisch Allerlei"* Dalam *Friesch Dagblad, 24 Oktober 1945, Lembar Ke-2, n.d.*). Sejak itu kehidupan orang-orang Belanda Depok ini berada di bawah jaminan dan pengawasan komandan Nica (Conica) setempat. Hal itu berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya keputusan dibuat untuk mengembalikan mereka ke kota Depok (ANRI).

Seiring dengan berakhirnya permusuhan politik dan militer antara Belanda dan Indonesia pada bulan Mei 1949, ketika kedua pihak kembali ke meja perundingan, secara berangsur-angsur kondisi keamanan di daerah berlangsung semakin kondusif. Namun demikian aktivitas bersenjata dan kelaskaran di daerah terutama di pelosok yang jauh dari pusat perkotaan masih berlangsung. Sejumlah aksi sabotase oleh kaum gerilayawan nasionalis bersenjata dengan sasaran terhadap Belanda baik sipil maupun militer, dan semua yang berafiliasi dengan mereka tetap saja terjadi pada berbagai infrastruktur seperti rumah, transportasi, jalur kereta api, saluran air dan sebagainya.

Bahkan ketika Indonesia dan Belanda mulai duduk bersama dalam perundingan Konperensi Meja Bundar antara awal Agustus dan akhir Desember 1949, situasi keamanan di daerah masih tetap belum sepenuhnya terjamin. Percampuran antara aksi kekerasan politik dan kejahatan ekonomi masih terus berlangsung dan sulit dipisahkan karena para pelakunya masih menguasai senjata api (*"Rampok en Moord"* dalam *Java Bode, Tanggal 16 Desember 1949, lembar Ke-2*). Sementara itu kesatuan TNI reguler yang diharapkan untuk bisa menjaga keamanan masih terfokus di daerah-daerah

Republik di Jawa Tengah dan belum semuanya beralih ke daerah pedalaman Jakarta dan sekitarnya. Sampai bulan Desember 1949, pihak Belanda masih bertanggungjawab atas keamanan kota-kota antara Bogor dan Jakarta (*“Bantam” dalam Het Nieuwsblad voor Sumatra, tanggal 22 Desember 1949, lembar Ke-2, n.d.*).

Selama menghuni barak pemukiman yang berada di kota Bogor, orang-orang Belanda Depok hidup dalam perlindungan tentara Belanda. Mereka juga mendapatkan jaminan logistik dan kesehatan dari pihak Nica yang menganggap mereka masih menjadi kawula dan bagian dari struktur politik yang akan ditegakkan kembali di Hindia Belanda. Pelayanan kesehatan rutin oleh palang merah juga disediakan bagi orang-orang ini dan pendidikan sementara disediakan di antara internal mereka dengan beberapa kunjungan dari dinas kesehatan Belanda untuk pencegahan penyakit menular seperti program vaksinasi (*“Stand en Pokkenepidemie Wordt Gunstiger” dalam het Dagblad, tanggal 10 Mei 1949, lembar Ke-2*).

Setelah situasi dianggap kondusif, khususnya untuk kota Depok dan perkampungan di sekitarnya, pada bulan April 1949 Conica di Bogor memutuskan untuk mengembalikan orang-orang Belanda Depok ini ke pemukiman lama mereka. Keputusan ini terutama diambil dalam rangka persiapan peralihan pemerintahan untuk kota Jakarta dan sekitarnya dari pihak Belanda kepada Indonesia pada bulan Mei 1949 dalam rangka persiapan Konferensi Meja Bundar. Sementara itu Depok dirancang untuk menjadi tempat kedudukan residen Jakarta dan sekitarnya sementara waktu (*“Bestuursoverdracht Residentie Batavia” dalam de Locomotief, tanggal 6 Mei 1949, lembar ke-2*). Jika hal ini terwujud, setidaknya Depok akan dijadikan sebagai ibukota atau pusat pemerintahan dari daerah Jakarta dan sekitarnya untuk wilayah di luar kotapraja (*“Bestuursoverdracht der Ommelanden” dalam het Dagblad, tanggal 5 Mei 1949, lembar ke-2*). Pengangkutan dilakukan dengan fasilitas milik Belanda dan pada pertengahan April 1949 mereka tiba kembali di kota Depok. Masing-masing keluarga kemudian mencoba untuk menemukan lagi rumah mereka yang lama.

Dalam hasil pencarian ini, sebagian besar menemukan kondisi rumah mereka telah rusak dan harta benda yang mereka tinggalkan telah hilang atau hancur. Fasilitas umum seperti gereja, kuburan, sekolah dan lain-lain yang telah dijarah dan dirusak pada bulan Oktober 1945 tetap terbengkalai seperti saat ditinggalkan. Praktis gereja dan sekolah hampir kosong sama sekali dan hanya menyisakan perabotan yang rusak atau reruntuhan puing sebagian bangunan. Kuburan yang telah dirusak dan didongkel oleh massa penjarah juga tetap dibiarkan terbuka tanpa ada upaya untuk memperbaikinya.

Lahan tanah juga sebagian telah berubah kepemilikan. Banyak ruang yang dahulu menjadi hak dari orang-orang Belanda Depok dan kerabatnya telah dikuasai oleh orang-orang pendatang, baik bekas para penghuni tanah partikelir maupun pendatang baru yang masuk selama kekosongan terjadi antara 1945-1949 (*“Vreemde Vondsten” dalam de Locomotief, tanggal 24 Maret 1949, lembar Ke-2*). Sebagai akibat dari situasi ini, banyak orang Belanda Depok yang kemudian harus berkumpul dalam beberapa rumah dan menghuni fasilitas umum yang masih porak poranda. Melihat kondisi ini, penguasa Nica setempat yang masih bertanggungjawab atas kota Depok dan sekitarnya mengumumkan bahwa Depok diberi status sebagai kota tertutup (*gesloten stad*) untuk mencegah kaum pendatang masuk dan tinggal di

Belanda Depok kembali bisa mendapatkan ruang tinggalnya (*“Depok Gesloten Stad” dalam het Dagblad, tanggal 21 April 1949, lembar Ke-2*).

Bukan hanya kondisi fisik prasarana yang telah berubah di kota Depok dari pemandangan yang lama, tetapi kehidupan sosial juga mengalami perubahan. Orang-orang Belanda Depok yang kembali dari pengasingan mereka menemukan bahwa meskipun keamanan hidup mereka tetap dijamin baik oleh tentara Belanda maupun kesatuan TNI yang perlahan-lahan ditempatkan sebagai penegak hukum, diri orang Belanda Depok merasakan seperti orang asing yang tinggal dan menghuni suatu daerah. Perasaan perbedaan dalam segala hal kehidupan sangat tinggi terhadap masyarakat yang menghuni perkampungan di sekitarnya dan di sebagian kota Depok ini. Sekalipun telah ada hubungan dan interaksi sejak sebelum perang revolusi tahun 1945, peristiwa selama empat tahun ini telah meruntuhkan ikatan tersebut dan hubungan mereka berubah drastis. Pemberian cap bahwa kelompok Belanda Depok adalah antek Belanda di mata penduduk sekitarnya terutama yang lebih berorientasi kepada RI sangat tinggi dan tumbuh menjadi kebencian. Aksi mereka tidak jarang dilakukan secara kolektif dengan sasaran orang Belanda Depok, atau setidaknya mereka membantu aksi kelompok bersenjata yang masih berkeliaran di sana (*“Terreur in Depokse Moord En Mishandeling” Dalam Nieuwe Courant, Tanggal 17 Desember 1949, Lembar Ke-2*).

Terlepas dari status tanah partikelir yang tidak lagi diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, hubungan para penghuni dan pemilik tanah Depok juga tidak lagi seperti dahulu. Para penghuni tidak lagi merasa perlu menghormati orang-orang Belanda Depok sebagai tuan tanah dan menganggap bahwa mereka kehilangan haknya sebagai penguasa tanah Depok, kecuali terbatas pada rumah-rumah yang mereka huni. Dari situ kemudian muncul polarisasi agraria secara perlahan yang kemudian mengarah pada kebijakan pemerintah pada tahun 1950 untuk mencabut tanah partikelir Depok (*“Situatie in Indonesie op Vele Punten Nog Induidelijk” dalam het Nieuwsblad voor Sumatra, tanggal 2 Februari 1949, lembar ke-2*). Pencabutan ini, dengan merujuk pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang penghapusan tanah partikelir tahun 1912, mengakibatkan perubahan status tanah itu menjadi tanah negara bebas (*vrije staatsdomein*).

Melalui pemberian status tanah negara bebas, mereka yang dahulu menjadi penghuni yang menumpang di tanah partikelir Depok mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan kepada pemerintah. Alasan mereka adalah bahwa pada status tanah negara bebas, siapapun yang telah tinggal dan merawat tanah selama dua puluh tahun, diperkenankan mengajukan permohonan status hak kepemilikan dengan itikad baik. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari penghapusan tanah partikelir Depok, berbondong-bondong orang-orang pendatang yang menghuni ex tanah partikelir Depok ini memohonkan hak kepemilikan tanah.

Ketika permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah, secara tiba-tiba komposisi kepemilikan lahan di kota Depok berubah. Pemilik tanah yakni keturunan Belanda Depok menjadi minoritas dibandingkan para pemilik tanah baru yang terdiri atas kaum pendatang dan keturunannya sebagai mayoritas. Sebagai konsekuensi dari kondisi baru ini, mengingat kepemilikan tanah menjadi simbol kekuatan ekonomi dan dominasi politik, kelompok minoritas Depok kehilangan status dan posisi istimewa mereka baik

segara legal formal maupun secara sosio-politik seperti yang mereka miliki sebelum tahun 1945.

Mencermati peristiwa yang terjadi, secara garis besar, Belanda Depok mengalami perubahan zaman yang signifikan dan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka sepanjang sejarahnya. Sejak dibentuk sebagai suatu komunitas pada awal abad XVIII hingga tahun 1945, komunitas ini tumbuh dan berkembang dengan damai dan sejahtera di bawah naungan struktur kolonial.

Keruntuhan struktur kolonial yang mendadak dan perubahannya menjadi struktur nasional telah mengubah nasib kelompok ini secara profan, yang tidak lagi bisa dipulihkan seperti di bawah struktur kolonial. Terlepas dari peristiwa politik yang melanda akibat terjadinya revolusi nasional Indonesia dan ekses-eksesnya di daerah, perubahan dalam kehidupan sosial orang Belanda Depok akan menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan hal ini adalah mengapa Belanda Depok sebagai suatu satuan komunitas yang mendominasi struktur lama begitu mudah digantikan oleh kekuatan komunitas lain yang muncul. Dengan kata lain, apakah proses di atas merupakan perubahan dalam struktur atau pergantian struktur dengan struktur yang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perbandingan dan kompetisi antara kedua kelompok: Belanda Depok dan komunitas penggantinya.

Di bawah struktur kolonial, Belanda Depok tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan di Depok. Mereka mendapatkan pendidikan, modal, kemampuan dan juga aksesibilitas pada pusat kekuasaan. Dengan posisi demikian, sebagai *agent* dari suatu struktur, komunitas Belanda Depok bisa dikatakan menguasai modal sosial dan modal ekonomi yang oleh Bourdieu dianggap sebagai syarat utama dalam pertarungan di arena.

Ketika revolusi nasional terjadi dan kelompok pendatang melakukan penyerbuan terhadap Depok, kelompok ini praktis tidak melakukan perlawanan. Mereka dengan mudah dikalahkan dan setidaknya bersikap pasif terhadap perubahan yang berlangsung. Mereka lebih banyak menunggu apa yang terjadi terhadap nasib mereka dan hanya menyaksikan semua yang berlangsung di sekitarnya, bahkan ketika terjadi tindakan yang merugikan bagi mereka secara materi dan fisik. Dalam hal ini proses kompetisi tidak berlangsung, dan terutama kemampuan serta modal yang mereka miliki tidak tampak sama sekali.

Apa yang bisa menyelamatkan komunitas Belanda Depok dalam hal ini adalah intervensi dari kekuatan kolonial lama yang berusaha memulihkan strukturnya. Meskipun pasukan Sekutu berhasil menjamin kembali keamanan di Depok selama pendudukan oleh Belanda antara 1945-1949, hal itu bukan berarti Belanda Depok kembali pada posisi seperti dalam struktur lama. Penarikan pasukan Belanda dan penyerahan kepada struktur yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia mengembalikan posisi Belanda Depok sebagai kelompok minoritas yang tidak lagi berperan seperti pada tahun 1945. Bahkan pada tahun 1950 kelompok ini kembali mendapatkan pukulan dengan pencabutan hak istimewa agraris mereka, di samping juga adanya sikap yang berubah dari komunitas di sekitarnya dalam hubungan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut tampak bahwa apa yang selama ini menjadi modal pada komunitas Belanda Depok bukan prestasi yang mereka capai seperti pendidikan, kekuatan ekonomi dan kemapanan status, melainkan struktur yang dibangun oleh rezim kolonial sendiri. Perlindungan Belanda atas mereka adalah faktor yang paling dominan sehingga melindungi pertumbuhan dan keberadaan mereka. Ketika perlindungan ini tidak ada lagi dan digantikan oleh struktur yang tidak lagi memberi mereka aksesibilitas bagi perlindungan serupa dengan rezim kolonial, kelompok Belanda Depok juga mengalami perubahan status dan terpinggirkan, bahkan terbuka pada ancaman dari kelompok lain yang mendapatkan perlindungan dan fasilitas dalam struktur baru.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan yang berlangsung di Depok antara 1945-1949 adalah perubahan struktural yang berlangsung sebagai bentuk pergantian struktur: dari struktur kolonial menjadi struktur nasional. Komunitas Belanda Depok menjadi obyek sekaligus korban dari perubahan ini. Hal ini nampak dari posisi mereka sebagai tuan di negeri sendiri bergeser menjadi orang asing di negeri asal mereka. Hal ini berdampak pada adanya kehidupan sosial diantara mereka dengan adanya keterbelahan identitas diantara “Belanda Depok”. Sebagian dari mereka ada yang ikut “pulang” ke Belanda bersama “tuannya” dan menjadi warga negara Belanda, sementara sebagian lagi tetap memilih tinggal di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Depok, secara umum dapat dikatakan bahwa, Belanda Depok mengalami perubahan signifikan dan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka sepanjang sejarahnya. Sejak dibentuk sebagai komunitas tersendiri pada awal abad XVIII hingga tahun 1945, komunitas ini tumbuh dan berkembang dengan damai dan sejahtera di bawah naungan struktur kolonial. Akan tetapi dalam perkembangannya, Belanda Depok mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-harinya. Pengalaman Komunitas Belanda Depok yang menjadi terasing di negeri sendiri membawa konsekuensi secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Konsekuensi itu tampak pada jarak sosial yang diciptakan penguasa Depok sejak abad XIX. Batas-batas sosio-kultural telah “memisahkan” komunitas Belanda Depok dengan masyarakat pada umumnya. Pemisahan dengan kelompok sosial lain telah menjadikannya Belanda Depok terseksklusi dari akar sosialnya. Secara psikologis, komunitas ini merasa seperti bermukim di ruang yang berbeda dengan komunitas lainnya di Depok sebagai tempat kelahirannya.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. G. O. (2006). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance 1944-1946*. Equinox.
- Anonim. (1879). *Inwijding van het Seminarie te Depok ter opleiding van Inlandsche Christenen tot den Evangeliedienst*. Hoveker en Zoon.
- ANRI. (n.d.-a). *Agenda nomor 913/A PWJ, 27 Oktober 1945, bundel Algemeen Secretarie Tempelaar*.

- ANRI. (n.d.-b). *Depok Rapporten, dalam Algemeen Secretarie Tempelaar 1942-1949*,.
- ANRI. (n.d.-c). *Proces Verbaal van Interrogatie over Aboebakar bin hasan 20 December 1945 nr. 532/7 MP, bundel Algemeen Secretarie Tempelaar 1942-1945*.
- “Bantam” dalam *Het nieuwsblad voor Sumatra*, tanggal 22 Desember 1949, lembar ke-2.
- “Bereid tot onderhandelen” dalam *Het parool*, tanggal 18 Oktober 1945, lembar ke-2.
- “Beroep op de wereld” dalam *Het Dagblad*, tanggal 11 Desember 1945, lembar ke-1.
- “Bestuursoverdracht der Ommelanden” dalam *Het Dagblad*, tanggal 5 Mei 1949, lembar ke-2.
- “Bestuursoverdracht residentie Batavia” dalam *De Locomotief*, tanggal 6 Mei 1949, lembar ke-2.
- “Bloedbad te Depok” dalam *Provinciale Drentsche en Asser Courant*, tanggal 27 Oktober 1945, lembar ke-2.
- Cribb, R. (1991). *Gangsters and revolutionaries: The Jakarta people’s militia and the Indonesian Revolution 1945 - 1949*. Allen and Unwin.
- “De toestand in Indie” dalam *Opregte Steenwijker Courant*, tanggal 26 Oktober 1945, lembar ke-2.
- “De toestand te Depok” dalam *Leeuwarder koerier*, tanggal 19 Oktober 1945, lembar ke-2.
- “Depok gesloten stad” dalam *Het Dagblad*, tanggal 21 April 1949, lembar ke-2.
- Faes, J. (1897). *Ontwerp nieuw reglement op de aparticuliere landerijen bewesten de Tjimanoek*. H. Prange.
- “Gruweldaden van rampokkers” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 18 Oktober 1945, lembar ke-2.
- Haar, B. T., & Moll, W. (1869). *Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederlandsch Indie: Vol. II*. G. Portielje en Zon.
- “Indisch allerlei” dalam *Friesch dagblad*, 24 Oktober 1945, lembar ke-2.
- Kahin, G. M. (2004). *Nationalism and revolution in Indonesia*. The Cornell University Press.
- Knorr, J. (2014). *Creole identity in postcolonial Indonesia*. Berhahn Books.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1901*, 501. (n.d.).
- McMillan, R. (2005). *The British Occupation of Indonesia, 1945-1946: Britain, the Netherland and the Indonesian revolution*. Routhledge.
- “Moordpartij in Depok” dalam *De Volkskrant*, tanggal 16 Oktober 1945, lembar ke-2.

“Moordpartij te Depok” dalam *Provinciale Drentsche en Asser Courant*, tanggal 17 Oktober 1945, lembar ke-2.

Nes, J. F. W. van. (1848). *Particuliere Landerijen*. Gebroeders Belinfante.

“Onrust in Indie duurt voort” dalam *Bredasche Courant*, tanggal 19 Oktober 1945, lembar ke-2. (n.d.).

Raben, R. (2000). Round about Batavia: Ethnicity and authority in the Ommelanden, 1650-1800. In K. Grijns & P. J. M. Nas (Eds.), *Jakarta- Batavia: Socio Cultural Essay* (p. 93). KITLV Press.

“Rampok en Moord” dalam *Java Bode*, tanggal 16 Desember 1949, lembar ke-2.

Reid, A. (1974). *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Longman.

“Situatie in Indonesie op vele punten nog onduidelijk” dalam *Het nieuwsblad voor Sumatra*, tanggal 2 Februari 1949, lembar ke-2.

“Stand en pokkenepidemie wordt gunstiger” dalam *Het dagblad*, tanggal 10 Mei 1949, lembar ke-2.

Steenbrink, H. (2015). *Catholics in Independent Indonesia, 1945-2010*. Brill.

Suryana, A. (2004). Kota Baru Depok: A Study of Suburbanization Process in Jakarta. In H. Kano (Ed.), *Growing Metropolitan Suburbia: A comparative sociological study on Tokyo and Jakarta* (p. 35). Yayasan Obor Indonesia.

“Terreur in Depokse moord en mishandeling” dalam *Nieuwe Courant*, tanggal 17 Desember 1949, lembar ke-2.

“Troepen naar Depok” dalam *de Tijd*, tanggal 18 Oktober 1945, lembar ke-2.

“Vijf eischen der Indonesie” dalam *Leeuwardier koerier*, tanggal 20 Oktober 1945, lembar ke-2. (n.d.).

“Vreemde vondsten” dalam *de Locomotief*, tanggal 24 Maret 1949, lembar ke-2..